Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

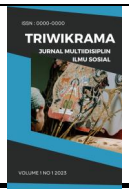

PKI SEBAGAI REPRESENTASI GERAKAN KELAS PROLETAR: TINJAUAN SOSIOLOGIS KARL MARX

Vivero Hartagantari, Dewi Khaeana, Ghea Moja Pradina, Laudyra Khoirunissa, Adrian Devano, Runi Sikah Seisabila
Budi Luhur University

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli, 2026
Revised Juli, 2026
Accepted Juli, 2026
Available online Juli, 2026

2543500884@student.budiluhur.ac.id,
2543500256@student.budiluhur.ac.id,
2543500223@student.budiluhur.ac.id,
2543500132@student.budiluhur.ac.id,
2543500330@student.budiluhur.ac.id,
runisikahseisabila@budiluhur.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai representasi gerakan proletar berdasarkan perspektif sosiologi Karl Marx. Menurut Teori Marx, sejarah peradaban manusia terbentuk sebagai akibat dari konflik-konflik antara kelas borjuis yang berkuasa dengan alat produksi dan kelas proletar. Di Indonesia, PKI merupakan salah satu partai politik yang dinyatakan bertarung untuk kepentingan kaum buruh. Kajian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara wawancara mendalam dengan narasumber dari Museum Pancasila Sakti Pengkhianatan PKI. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKI mengadopsi konsep perjuangan kelas sebagai ideologinya dalam melakukan perjuangan atas kepentingan buruh dan petani. Hal ini, tentu saja, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di dalam masyarakat indonesia.

Kata Kunci: Karl Marx; PKI; Proletar

ABSTRACT

This study aims to analyze the Indonesian Communist Party (PKI) as a representation of the proletarian movement from the perspective of Karl Marx's sociology. According to Marx's theory, the history of human civilization is shaped by conflicts between the ruling bourgeoisie, which controls the means of production, and the proletariat. In Indonesia, the PKI was one of the political parties that claimed to fight for the interests of the working class. This study employed a quantitative method, specifically in-depth interviews with informants from the Pancasila Sakti Museum on the PKI Betrayal. The results of the study indicate that the PKI adopted the concept of class struggle as its ideology in its fight for the interests of workers and farmers. This was, of course, influenced by various factors within Indonesian society.

Keywords: *Karl Marx; PKI; Proletariat*

PENDAHULUAN

Sebuah ideologi besar tidak pernah lahir di dalam ruang hampa, ia senantiasa terbentuk sebagai respons terhadap krisis zamannya, lalu bermutasi ketika melintasi batas geografis, budaya, dan generasi. Fenomena ini terlihat jelas pada Marxisme, sebuah korpus pemikiran ekonomi-politik yang dirumuskan oleh Karl Marx pada abad ke-19 di tengah

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

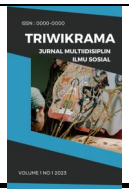

derasnya arus Revolusi Industri di Eropa. Marx membedah masyarakat melalui pisau analisis materialisme dialektis, dengan argumen fundamental bahwa sejarah umat manusia digerakkan oleh kontradiksi inheren dan perjuangan kelas antara kaum borjuis pemilik modal dan kaum proletar yang tertindas. Di belahan bumi yang lain, gagasan radikal ini menemukan tanah subur untuk tumbuh ketika benih-benihnya dibawa ke kepulauan Nusantara pada awal abad ke-20. Manifestasi paling konkret dan masif dari pengaruh pemikiran Marx ini mewujud dalam berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920, yang tercatat sebagai partai komunis pertama di Asia di luar wilayah bekas Kekaisaran Rusia. Kendati terpisah oleh jarak ruang dan waktu yang demikian jauh dari Eropa, PKI mengadopsi tatanan berpikir Marx sebagai fondasi filosofis utama untuk menggugat struktur kekuasaan yang ada.

Namun, hubungan antara PKI dan Karl Marx tidak dapat dilihat sebagai penerapan ideologi yang utuh atau adopsi teks yang kaku. Ketika Marxisme diaplikasikan di Indonesia, terjadi proses hibridisasi dan kontekstualisasi ideologis yang tak terelakkan. Jika Marx merancang teorinya dengan berasumsi pada masyarakat industri Barat yang berbasis buruh pabrik urban, PKI dihadapkan pada realitas masyarakat Hindia Belanda—dan kemudian Indonesia pasca-kemerdekaan—yang bercorak agraris, feodal, dan berada di bawah cengkeraman imperialisme asing. Alhasil, para tokoh PKI harus melakukan rekayasa teoretis agar gagasan Marx tetap relevan; salah satunya dengan memperluas definisi "proletar" untuk merangkul jutaan petani miskin dan buruh tani sebagai motor utama revolusi, alih-alih hanya mengandalkan buruh industri yang jumlahnya sangat minoritas. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana teori-teori dasar Karl Marx ditransmisikan oleh PKI ke dalam lanskap sosio politik lokal. Lebih jauh, analisis ini akan mengeksplorasi sejauh mana modifikasi ideologis tersebut berhasil menggerakkan massa, serta bagaimana kontradiksi antara teori murni Marxisme dan realitas di lapangan membentuk dinamika perjuangan kelas yang unik sekaligus penuh pergolakan dalam sejarah modern Indonesia.

KAJIAN TEORI

PKI didirikan pada tahun 1920, partai ini merupakan salah satu partai tertua di Indonesia. PKI berawal dari sebuah organisasi yang bernama *Indische Sociaal Democratische Vereeniging*. Lalu, diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia pada tahun 1920 dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Pada masa ISDV pun organisasi ini sudah dipengaruhi oleh pemikiran Marxisme dan seiring waktu menjadikan pemahaman Marxisme-Leninisme sebagai landasan ideologi partai. Ideologi tersebut mendorong PKI untuk memperjuangkan kelas proletariat dan upaya pembentukan masyarakat tanpa kelas. Dalam perkembangannya, PKI menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar negara-negara komunis, terutama dalam aspek jumlah pengikutnya. Tetapi, penerapan Marxisme-Leninisme yang dilakukan oleh PKI tidak

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

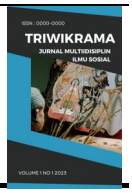

sepenuhnya sejalur dengan pemikiran Marx. PKI mengadaptasi dan menyesuaikan pemahaman Marxisme-Leninisme sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia.

Marxisme merupakan sebuah teori sosial dan politik yang menggunakan perspektif materialis untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi, kelas sosial, dan dinamika perubahan masyarakat (Marx & Engels, 1848; Marx, 1867). Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx yang menyatakan bahwa terdapat dua kelas sosial utama dalam struktur sosial-ekonomi di masyarakat kapitalis, borjuis dan proletariat. Marx berfokus pada hubungan antara kelas sosial dan penguasaan sarana produksi dan bagaimana relasi individu dengan sarana produksi menentukan kelas sosial. Dalam masyarakat kapitalis, kelas borjuis yang memiliki alat-alat produksi dan proletariat sebagai kelas buruh yang tidak memilikinya sehingga menjual tenaga kerjanya kepada pemilik sarana produksi untuk mendapatkan penghasilan. Ketimpangan kepemilikan alat-alat produksi antara dua kelas dan konflik yang muncul akibatnya tersebut pun menjadi landasan perjuangan penganut teori marxisme.

Salah satu konsep utama dalam marxisme adalah konflik kelas yang terjadi karena ketimpangan penguasaan sarana produksi antarkelas. Dalam teori konflik Karl Marx, ia menjelaskan bahwa konflik antarkelas timbul karena kelas penguasa alat-alat produksi mendapatkan keuntungan dari nilai lebih atau *surplus value* yang dihasilkan tenaga kerja kaum proletar. *Surplus value* ini merupakan nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja kaum proletar melebihi upah yang diperoleh mereka. Pengambilan *surplus value* menurut Marx merupakan bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis kepada kaum proletar. Eksploitasi tersebut pun mendorong kaum proletar untuk memperjuangkan kesetaraan dalam kepemilikan sarana produksi dan menghilangkan ketimpangan antar kelas (Marx, 1867). Pemikiran Marx tersebut menjadi landasan bagi berbagai pengembangan pemikiran dari Marxisme murni, salah satunya merupakan Leninisme yang dikembangkan oleh Vladimir Lenin.

Leninisme merupakan pengembangan dari teori marxisme yang memperkenalkan partai pelopor revolusioner. Dalam ideologi Leninisme, partai pelopor revolusioner berfungsi untuk memberikan kaum proletar kesadaran politik dan kepemimpinan revolusi yang dibutuhkan untuk menggulingkan kapitalisme (Lenin, 1917). Dalam pemahaman Marx dan Lenin, masyarakat komunis adalah masyarakat yang tidak memiliki struktur kelas sosial dan dicapai melalui revolusi kaum proletar (Marx & Engels, 1848; Lenin, 1917). Dari gabungan kedua pemahaman terlahirlah ideologi Marxisme-Leninisme yang menjadi dasar ideologi berbagai partai komunis di berbagai negara. Salah satu partai komunis yang mengadopsi pemahaman Marxis-Leninis adalah Partai Komunis Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum kajian ini yang membahas tentang gerakan PKI. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nami (2022) membahas tentang mengapa gerakan pemberontakan PKI mengalami kegagalan. Soedarmo (2019) melakukan penelitian tentang sejarah perkembangan PKI.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

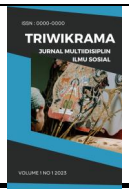

Penelitian yang dilakukan oleh Permata (2016) meneliti kejadian G30S PKI dalam perspektif filsafat marxisme. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus meneliti PKI yang berkaitan dengan pemikiran Karl Marx dan pengaplikasiannya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan kajian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan PKI sebagai bentuk perjuangan kaum proletar berdasarkan perspektif teori konflik milik Karl Marx. data diperoleh melalui hasil wawancara, jurnal ilmiah, studi pustaka dengan mengkaji beberapa buku, dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan perkembangan PKI serta pemikiran Karl Marx. Data kemudian dianalisis berdasarkan konsep-konsep utama Karl Marx, seperti kelas sosial, eksploitasi, dan perjuangan kelas, untuk menjelaskan kemunculan dan perkembangan PKI di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PKI Sebagai Representasi Kaum Proletar

Berdasarkan hasil kajian pustaka, PKI memandang dirinya sebagai organisasi yang memperjuangkan tercapainya kesetaraan kelas sosial. Pandangan ini sejalur dengan konsep perjuangan kelas yang dibahas oleh Karl Marx (1867), yaitu adanya konflik antara kaum yang menguasai sarana produksi (borjuis) dan kaum buruh (proletariat). Namun, dalam penerapannya PKI tidak sepenuhnya mengikuti pemikiran Marx, kondisi sosial Indonesia pada masa itu didominasi oleh pekerja petani. Hal ini menyebabkan PKI untuk memperluas dasar perjuangannya, bukan hanya kaum buruh yang digambarkan oleh marx, tetapi juga kaum petani.

Dalam salah satu bukunya, Karl Marx (1848) menyebutkan salah satu perjuangan kaum proletar yaitu kesetaraan kelas. Menurutnya dalam dunia ini tidak seharusnya ada kelas kelas sosial yang menjadi pembatas kesetaraan hidup. Dari sinilah ideologi komunis muncul, dimana salah satu misinya adalah memperjuangkan terbentuknya masyarakat komunis, yaitu masyarakat yang tidak memiliki penggolongan kelas sosial berdasarkan relasi individu dengan kepemilikan alat-alat produksi.

Strategi utama yang diterapkan oleh PKI dalam upaya menggerakkan organisasi buruh dan para petani adalah pemogokan dan demonstrasi. Aksi pemogokan dapat diumpamakan sebagai sebuah senjata dalam upaya perlawanan kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum proletar. Salah satu penerapan pemogokan ini adalah pemogokan buruh yang terjadi di Delanggu pada tanggal 19-23 Juni 1948. Selain aksi pemogokan buruh, PKI juga mendorong para petani untuk melakukan demonstrasi untuk menuntut reformasi agraria. Aksi demonstrasi ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, dan seringkali dilakukan secara massal. Tuntutan para petani meliputi hal seperti redistribusi kepemilikan tanah dan juga penentangan kebijakan-kebijakan yang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 1, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

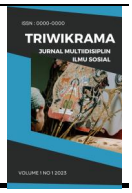

mengeksploitasi para petani. Dalam perspektif marxis, tanah merupakan salah satu sarana produksi yang mampu melahirkan ketimpangan sosial hingga dapat memicu konflik antara kaum yang memiliki dan yang tidak memiliki (Marx, 1867). Ketimpangan kepemilikan tanah pertanian pada masa itu menyebabkan petani menjadi kaum yang rentan akan eksploitasi. Maka dari itu perjuangan PKI mendukung perombakan tanah pertanian mampu dilihat sebagai perjuangan nilai nilai kelas proletariat.

Selain pemogokan dan demonstrasi, upaya PKI untuk membangun kesadaran politik di masyarakat menggunakan sarana media cetak. Hal seperti surat, majalah, dan berbagai bentuk publikasi lainnya digunakan untuk menyebarkan edukasi tentang perjuangan kelas, kritik terhadap kapitalisme, dan pentingnya persatuan kaum buruh dan para petani. penyebaran pendidikan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun kesadaran kelas (*class consciousness*) yang dibahas oleh perspektif marxis. Menurut Marx (1867), kaum proletar harus membangun kesadaran kelas supaya menyadari bahwa kaum proletar merupakan kelas yang dieksploitasi oleh kaum borjuis. Namun, strategi menggunakan media cetak untuk melakukan upaya tersebut mencerminkan pengaruh Leninisme yang membahas pentingnya sebuah partai pelopor (*vanguard party*) yang berperan sebagai pembimbing kaum proletar.

Dalam konteks kondisi sosio ekonomi Indonesia pada saat itu, aksi-aksi PKI dapat diklasifikasi sebagai upaya perjuangan kelas proletar. Walaupun nilai dasar Marxisme hanya fokus kepada buruh pabrik sebagai kaum proletar, perjuangan PKI untuk para petani dapat dilihat sebagai adaptasi dari nilai dasar tersebut sesuai kondisi sosial Indonesia. Oleh karena itu, PKI tetap mengadopsi nilai-nilai dasar Marxisme seperti perjuangan kelas dan penghapusan eksploitasi, walaupun representasi dari aksi-aksi PKI merupakan adaptasi dari nilai-nilai dasar tersebut.

2. Adaptasi PKI Terhadap Nilai Marxisme dan Leninisme

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Museum Pengkhianatan PKI, narasumber menyatakan bahwa,"Pada waktu itu, di eropa berkembang pahaman komunis untuk kaum proletar menghadapi kaum borjuis. Efek itu kemudian berkembang konsep-konsep pemikiran itu, dari Karl Marx, Hegel, Stalin, Lenin. Disini, di Indonesia waktu itu masih dijajah oleh Belanda, mulai terbuka kesempatan untuk berpikir lebih jauh." (Wawancara, 6 Januari 2026). Narasumber juga membahas tentang konsep politik etis, ia menyatakan bahwa isi politik etis ada tiga, imigrasi, irigasi, dan edukasi. Lalu konsep edukasi politik etis ini pun membuka akses pendidikan untuk masyarakat pribumi hingga menyebabkan berbagai pemikiran modern masuk ke Indonesia, seperti Marxisme dan komunisme.

PKI pada awalnya tidak langsung mengadopsi pemahaman Marxisme-Leninisme. Pada saat organisasi tersebut masih memiliki nama ISDV, pemikiran sosialis lebih mempengaruhi ideologi organisasi tersebut. Seiring perkembangan

politik internasional, ideologi organisasi semakin menuju ke Marxisme-Leninisme. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan ideologi PKI tidak terjadi secara spontan, tetapi sebuah proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh politik internasional ataupun politik Indonesia.

Ideologi PKI pun bukanlah sebuah penerapan Marxisme-Leninisme murni, tetapi sebuah adaptasi dari nilai-nilai dasar pemikiran tersebut yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Salah satu contoh dari penyesuaian nilai dasar Marxisme-Leninisme yang dilakukan oleh PKI adalah dukungannya terhadap para petani. Dalam Marxisme murni, kaum proletariat dipahami sebagai buruh industri yang tidak memiliki sarana produksi dan menjual tenaga kerjanya kepada kaum borjuis. Namun, pada saat itu Indonesia merupakan masyarakat agraria. Dibanding dengan masyarakat industrial yang Marx bicarakan, mayoritas buruh di Indonesia merupakan para petani. Maka, aksi PKI dalam memobilisasi para petani sebagai representasi kelas proletar merupakan adaptasi nilai dasar Marxisme maupun Leninisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Selain itu, aksi PKI dalam upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan menggunakan media cetak dapat dilihat sebagai adaptasi dari pemikiran Leninisme. Lenin (1917) menyatakan bahwa partai pelopor memiliki peran dalam mengedukasikan dan meningkatkan kesadaran kelas kaum proletar. Aksi penyebaran edukasi melewati media cetak pun menunjukkan bahwa PKI dipengaruhi oleh konsep *vanguard party* yang dibicarakan oleh Lenin. Walaupun pengaruh Leninisme terlihat lebih kuat, PKI tetap mempertahankan beberapa konsep Marxisme klasik. Konsep seperti perjuangan kelas, penentangan terhadap eksploitasi, dan tujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas (Marx & Engels, 1848; Lenin, 1917).

Berdasarkan hasil kajian, dapat dilihat bahwa ideologi PKI merupakan campuran dari berbagai konsep Marxisme klasik yang dipertahankan dan pengaruh dari konsep *vanguard party* yang dibicarakan oleh Lenin. Konsep seperti perjuangan kelas yang dikemukakan oleh Marx kemudian diperluaskan oleh PKI untuk mencakup para petani. Strategi seperti menggunakan media cetak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dipahami sebagai aksi dari sebuah partai pelopor yang mempunyai peran sebagai pemimpin kaum proletariat.

3. Kegagalan PKI Sebagai Representasi Kaum Proletar

Menurut narasumber yang diwawancara, PKI pernah mengklaim bahwa mereka adalah partai komunis terbesar yang ketiga di dunia berdasarkan jumlah pengikutnya (Wawancara, 6 Januari 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa perkembangannya PKI dapat menjadi representasi kaum proletar yang

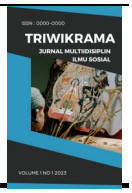

mementingkan hal seperti perjuangan kelas. Dukungan tersebut merupakan hasil dari upaya PKI meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga membentuk berbagai organisasi bawahan yang memperjuangkan kepentingan kaum-kaum tersebut. Terdapatnya dukungan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi Indonesia pada saat itu. Hal seperti ketimpangan penguasaan tanah dan masih adanya struktur sosial yang tidak setara menjadi fokus perjuangan kelas yang lalu menarik perhatian sebagian masyarakat.

PKI juga membentuk berbagai organisasi massa seperti organisasi buruh dan organisasi petani. Melalui organisasi-organisasi tersebut PKI memobilisasi kaum proletar untuk melakukan aksi seperti pemogokan. Tuntutan seperti hak-hak buruh dan reforma agraria pun disalurkan melalui organisasi-organisasi tersebut hingga kegiatan politik yang dilakukan lebih terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa perkembangannya PKI cukup berhasil dalam menjalankan perannya sebagai representasi kaum proletariat di Indonesia.

Tetapi, seiring perkembangannya, PKI mulai mengarahkan sebagian aktivitas partai untuk mempertahankan posisi partai politiknya. Hal ini terjadi karena PKI mulai memberikan fokus kepada persaingan politik nasional, sehingga tidak sepenuhnya mengutamakan perjuangan kepentingan kaum proletariat. Gerakan - gerakan PKI pun juga terkadang mempunyai sifat alienasi terhadap berbagai kelompok sosial lainnya. Seperti pemberontakan 1926-1927 yang tidak memiliki citra baik di kalangan kelompok Sarekat Islam dan Muhammadiyah atau golongan putih lainnya (Nami, 2022).

Terjadinya peristiwa G30S PKI merupakan titik balik yang memberhentikan momentum dan juga mengakhiri posisi PKI sebagai partai politik Indonesia. Akibat hancurnya PKI setelah kejadian G30S, kaum buruh dan para petani mengalami kehilangan salah satunya organisasi politik yang menempatkan kepentingan perjuangan mereka sebagai sebuah keutamaan.

Menurut Nami (2022), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan salah satu aksi PKI, khususnya pemberontakan 1926-1927. Faktor internal seperti ketiadaannya pemimpin yang cocok dan efektif, maupun faktor eksternal seperti tidak mendapat dukungan dari organisasi luar. Hal ini dapat menunjukkan kelemahan PKI dalam melakukan aksi pemberontakan 1926-

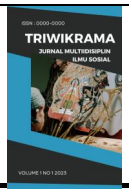

1927. Kegagalan pemberontakan 1926-1927 menunjukkan bahwa keberhasilan perjuangan kelas tidak cukup ditentukan dengan ideologi yang dianut, namun juga kemampuan organisasi dalam melakukan aksi perjuangan. Kejadian yang serupa dapat dilihat juga pada saat kejadian G-30-S, menurut Putranov et al. (2026) pasukan G-30-S tidak bertindak seperti pasukan kudeta. Terdapat berbagai hal yang menunjukkan kurangnya persiapan, seperti tidak mengincar komando lawan atau tidak memiliki tank.

Dalam perspektif Marxisme, organisasi yang dapat membangun persatuan dan kesadaran kelas untuk kaum proletar dibutuhkan untuk perjuangan kelas (Marx, 1867). Hal ini juga serupa dengan konsep *vanguard party* yang diajukan oleh pemahaman Leninisme (Lenin, 1917). Dengan hancurnya PKI sebagai organisasi pemimpin kaum proletar, maka hilangnya kemampuan untuk kaum buruh dan para petani untuk memperjuangkan ideologi kaum proletar. Maka upaya PKI dalam memperjuangkan kaum proletar dan meningkatkan posisi kaum tersebut tidak tercapai dalam jangka yang lama.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa pada masa perkembangannya PKI menerapkan konsep-konsep dasar Marxisme, seperti perjuangan kelas, penolakan atas eksploitasi, dan juga upaya membangun kesadaran masyarakat buruh dan petani. Melalui berbagai aksi yang disalurkan lewat organisasi massa seperti pemogokan, tuntutan hak buruh, serta dukungan terhadap reforma agraria, PKI sempat menjadi representasi kaum proletariat di Indonesia. Namun, pengalihan sebagian fokus PKI ke dalam persaingan politik nasional menimbulkan berbagai isu seperti menurunnya pendukung dan konflik dengan kelompok lain. Hal ini menyebabkan PKI untuk tidak mampu mempertahankan posisinya sebagai partai representasi kaum proletar sehingga dibubarkan setelah peristiwa G-30-S 1965. Dengan hancurnya PKI organisasi massa yang mewakili kaum buruh dan petani pun ikut dibubarkan.

Maka dari itu, PKI dapat dilihat sebagai organisasi yang berupaya memperjuangkan kaum proletariat berdasarkan pemikiran Marxisme-Leninisme. Namun, penerapan nilai-nilai dasar ideologi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep perjuangan kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perjuangan kaum proletar tidak dapat tercapai

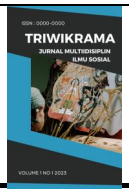

hanya dengan ideologi yang dianut, tetapi juga dengan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan strategi perjuangan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang selalu berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kajian ini, menunjukan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan organisasi politik yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, Khususnya dalam konsep perjuangan kelas, penolakan terhadap eksploitasi, dan pembentukan masyarakat tanpa kelas. Dalam kenyataannya, konsep proletariat tidak digunakan secara keseluruhan, tetapi berubah sesuai dengan kondisi sosial indonesia yang didominasi oleh masyarakat agraris. ini dapat dilihat dari ekspansi konsep proletariat, yaitu mencakup tidak hanya buruh industri tetapi juga petani dan buruh tani sebagai basis utama dalam perjuangan pki.

Selain itu, Kajian ini juga menunjukan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) mewakili kelas proletar melalui pembentukan organisasi massa, pemogokan, demonstrasi, tuntutan reforma agraria, dan penyebaran kesadaran politik melalui media cetak. Strategi ini menunjukan perpaduan antara gagasan perjuangan kelas Karl Marx dan gagasan pendukung Leninisme, sehingga ideologi PKI dapat dipahami sebagai adaptasi Marxisme dan Leninisme yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik indonesia. Namun, ketika PKI semakin terfokus pada kompetisi politik nasional, persepsinya sebagai gerakan kelas proletar menjadi terbatas.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak perselisihan politik dan sosial, yang pada akhirnya menyebabkan organisasi menjadi lebih lemah dan dibubarkan setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965. Dengan berakhirnya PKI, organisasi-organisasi yang sebelumnya membantu perjuangan buruh dan petani juga mulai kehilangan peran mereka. Hasilnya menunjukan bahwa ideologi yang dianut oleh gerakan kelas bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan strategi perjuangan dengan perubahan yang terjadi dalam sejarah, sosial, dan politik. Oleh karena itu PKI dapat dipahami sebagai representasi gerakan kelas proletar yang mengadaptasi pemikiran dari Karl Marx ke dalam konteks indonesia.

REKOMENDASI

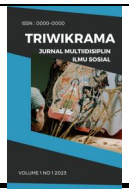

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan

1. Diharapkan terdapat penelitian lanjut mengenai analisis terhadap pergerakan PKI dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif,
2. Adanya analisis lebih rinci mengenai aksi dan strategi yang dilakukan PKI dalam melakukan aktivitas politiknya,
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai nasib gerakan kaum buruh setelah kegagalan PKI

Dengan rekomendasi yang telah disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya mengenai pergerakan PKI dan berbagai dampaknya terhadap kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Lenin, V. I. (1917). The State and Revolution.

Marx, K. (1867). Capital: A Critique of Political Economy (Vol. 1).

Marx, K., & Engels, F. (1848). Manifesto of the Communist Party.

Nami, N.I. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926-1927. Politeia: Jurnal Ilmu Politik.

Permata, H. (2016). Gerakan 30 September 1965 dalam perspektif filsafat sejarah Marxisme. Jurnal Filsafat, 25(2), 220–251. https://doi.org/10.22146/jf.12680

Putranov, F., Ilham, A. P., Zid, M., Mustikarani, W., & Saputro, H. D. (2026). G30S/PKI 1 Oktober 1965: Fakta Sejarah dan Kontroversi Keterlibatan Soeharto. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum (SENPISHUM), 1(1). Retrieved from https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/senpishum/article/view/62795

Soedarmo, U. R. (2019). Perkembangan politik Partai Komunis Indonesia (1948–1965). Jurnal Artefak, 2(2), 129–138. https://doi.org/10.25157/ja.v2i2.1061

Wawancara dengan Kepala Museum Pengkhianatan PKI, Museum Pancasila Sakti, 6 Januari 2026.